



**PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN NAGARI
BAGI APARAT PEMERINTAHAN NAGARI DAN TOKOH
MASYARAKAT
DI NAGARI PERSIAPAN KAMANG TANGAH ANAM SUKU
KECAMATAN KAMANG MAGEK, KABUPATEN AGAM**

Al Rafni dan Suryanef

Staf Pengajar Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang

ABSTRAK

Pengabdian kepada masyarakat ini merupakan hilirisasi dari tiga penelitian sebelumnya. Dari ketiga hasil penelitian tersebut menunjukkan perlunya usaha serius untuk meningkatkan sumberdaya manusia pada pemerintahan nagari, khususnya perangkat pemerintahan nagari. Terlebih lagi bagi nagari baru hasil pemekaran seperti Nagari Persiapan Kamang Tengah Anam Suku di Kecamatan Kamang Magek Kabupaten Agam. Nagari ini membutuhkan perangkat nagari serta tokoh-tokoh masyarakat nagari yang memahami proses penyusunan perencanaan pembangunan nagari melalui teknik sketsa nagari, kalender musim, diagram kelembagaan, serta peluang potensi nagari. Khalayak sasaran akhirnya dapat memahami dan mempraktekkan cara-cara penggalan potensi nagari sekaligus menyusun rencana pembangunan nagari. Metode pelaksanaan terdiri dari dua bentuk yaitu penyuluhan dan *workshop*.

Kata kunci : perencanaan pembangunan nagari, perangkat nagari, dan teknik penggalan potensi nagari.

PENDAHULUAN

Program kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertolak dari hasil penelitian M. Fachri Adnan dan Al Rafni tahun 2014 dan 2015 tentang Tata Kelola Pemerintahan Nagari di Sumatera Barat. Salah satu temuan penelitian menunjukkan kecenderungan masih rendahnya kemampuan aparatur pemerintahan nagari dalam menyusun perencanaan pembangunan nagari sehingga berdampak pada kinerja pelayanan pemerintah nagari sekaligus sebagai faktor penentu efektif-

tidaknya tata kelola pemerintahan nagari.

Temuan serupa juga diungkapkan dari hasil penelitian Al Rafni dan Suryanf (2005) tentang Pembinaan dan Penataan Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari di Sumatera Barat, yang menyimpulkan bahwa terdapat berbagai kendala untuk mewujudkan manajemen pemerintahan nagari yang lebih efektif dan efisien. Kendala-kendala yang ditemukan antara lain : (1) rendahnya kemampuan untuk menyusun perencanaan

pembangunan nagari ; (2) lemahnya kondisi internal pemerintahan nagari ; dan (3) rendahnya partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan nagari.

Selanjutnya temuan penelitian *multi years* yang dilakukan Suryanef, dkk. (2009-2011) terkait dengan Pemberdayaan Masyarakat Adat Sebagai Basis Penataan Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari di Sumatera Barat juga mengungkapkan kondisi marjinal masyarakat adat di nagari-nagari Sumatera Barat terutama dalam memahami penyusunan peraturan nagari, perencanaan pembangunan nagari, mau pun pengetahuan masyarakat terhadap proses penyelenggaraan pemerintahan nagari.

Dari ketiga hasil penelitian tersebut menunjukkan perlunya usaha serius untuk meningkatkan sumberdaya aparat pemerintahan nagari sekaligus peningkatan pengetahuan masyarakat tentang tata kelola pemerintahan nagari secara umum. Terlebih bagi nagari yang baru sebagai hasil pemekaran seperti Nagari Persiapan Kamang Tengah Anam Suku. Nagari persiapan yang baru ini membutuhkan aparat pemerintahan yang memahami proses penyusunan perencanaan pembangunan nagari, memahami prinsip-prinsip penyusunan rencana program pembangunan nagari, memahami bagaimana pengkajian potensi dan masalah nagari berdasarkan sketsa nagari, kalender musim, diagram kelembagaan, serta mengkaji peluang sumberdaya nagari. Keseluruhan pengetahuan

dan keterampilan ini perlu dilatihkan kepada aparat pemerintahan nagari persiapan untuk menghadapi pelaksanaan tugas dan pelayanan masyarakat di nagari yang baru dimekarkan tersebut.

Nagari Kamang Tengah Anam Suku merupakan nagari persiapan hasil pemekaran dari Nagari Kamang Mudiak berdasarkan Peraturan Bupati Agam tentang pembentukan nagari persiapan yang tertuang dalam Peraturan Bupati Agam No.37 tahun 2017 dan tercatat dengan nomor register 06.15.2004. Nagari persiapan adalah bagian dari nagari baru. Pusat pemerintahan Nagari Persiapan Kamang Tengah Anam Suku terletak di Jorong Pakan Senayan. Penduduk berjumlah 3.195 jiwa dan terdiri atas 871 Kepala Keluarga (KK). Adapun luas wilayah nagari ini adalah 12,85 km². Cakupan wilayahnya terdiri dari 2 jorong yaitu Jorong Bansa dan Jorong Pakan Senayan. Nagari ini memiliki batas nagari sebagai berikut : (1) sebelah Utara dengan Nagari Kamang Mudiak ; (2) sebelah Selatan dengan Kecamatan Tilatang Kamang ; (3) sebelah Barat dengan Nagari Kamang Mudiak ; dan (4) sebelah Timur dengan Nagari Kamang Hilir.

Untuk memecahkan persoalan mitra, maka dilakukan penyuluhan peningkatan pengetahuan dan pelatihan pada khalayak sasaran yaitu aparat pemerintahan nagari dan tokoh masyarakat nagari tentang : (1) proses penyusunan perencanaan pembangunan nagari ; (2) prinsip-prinsip penyusunan rencana

program pembangunan nagari ; (3) pelaksanaan perencanaan pembangunan nagari melalui pengkajian potensi dan masalah nagari berdasarkan sketsa nagari, kalender musim, dan diagram kelembagaan ; dan (4) mengkaji peluang sumberdaya nagari sebagai bahan menyusun perencanaan pembangunan nagari.

Setiap pemerintahan nagari perlu menyusun dokumen perencanaan pembangunan berupa rencana kerja pembangunan sebagai penjabaran pembangunan jangka menengah nagari (RPJM-Nagari). Amanat ini tertuang pada pasal 79 UU No.6 tahun 2014 tentang Desa. Rencana pembangunan nagari disusun secara berjangka yang meliputi RPJM-Nagari untuk jangka waktu 6 tahun dan rencana pembangunan tahunan nagari yang disebut dengan rencana kerja pemerintahan nagari (RKPN) untuk jangka waktu satu tahun.

Perencanaan pembangunan dapat dikategorikan kedalam dua hal yaitu perencanaan pembangunan sebagai proses dan perencanaan pembangunan sebagai hasil. Perencanaan pembangunan sebagai proses merupakan tindakan pemilihan alternatif terbaik dan usaha mencapai tujuan. Sementara itu perencanaan pembangunan sebagai suatu keputusan (hasil) adalah keputusan yang memperhatikan lebih banyak data yang ada atau hasil yang mungkin dicapai pada masa yang akan datang (Suryanef, dkk., 2011).

pengertian perencanaan adalah menetapkan suatu tujuan

dan memilih langkah yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut. Sementara pembangunan merupakan suatu kenyataan fisik sekaligus tekad suatu masyarakat untuk berupaya sekeras mungkin melalui serangkaian kombinasi proses sosial ekonomi dan institusional demi mencapai kehidupan yang serba lebih baik (Todaro, 2004).

Perencanaan pembangunan memiliki banyak pengertian yang dijelaskan dari beragam perspektif. Pada dasarnya perencanaan pembangunan adalah merupakan suatu tahapan dalam proses pembangunan. Perencanaan pembangunan ini perlu diperhatikan mengingat : *Pertama*, banyak diantara potensi wilayah selain terbatas juga tidak mungkin lagi diperbaharui. *Kedua*, kemampuan teknologi dan cepatnya perubahan kehidupan manusia. *Ketiga*, kesalahan dari penggunaan sumberdaya yang tidak terencana sebelumnya. *Keempat*, kemampuan manusia dalam memanfaatkan sumberdaya yang tersedia tidak sama sementara sumber tersebut dibutuhkan untuk menopang kehidupan. *Kelima*, kondisi sosial dari masyarakat yang kadang menyebabkannya menjadi tidak disiplin (PPS Unand, 2004).

Menurut Jhingan (2003) syarat-syarat perencanaan yang baik memiliki ciri-ciri berikut :

1. Perencanaan dibuat oleh komisi perencanaan.
2. Didukung oleh data statistik yang memadai.
3. Memiliki tujuan yang jelas.

4. Penetapan sasaran dan prioritas yang tegas.
5. Mobilitas sumberdaya.
6. Keseimbangan dalam perencanaan.
7. Administrasi yang efisien dan tidak korup.
8. Kebijakan yang tepat.
9. Didasarkan oleh pendidikan.

Sementara Ewert dan Yaccino menyebutkan perencanaan yang baik memiliki prinsip berikut :

1. Partisipasi masyarakat.
2. Proses pengambilan keputusan yang dilaksanakan oleh penduduk setempat.
3. Komitmen dari sumberdaya setempat.
4. Peranan orang luar sebagai fasilitator.
5. Kepercayaan terhadap kemampuan masyarakat untuk melakukan perubahan seandainya diberikan kesempatan oleh struktur lingkungan mereka.
6. Penghargaan terhadap pengetahuan penduduk setempat.
7. Pengertian pembangunan sebagai suatu proses dan bukan sebagai rentetan dari “proyek-proyek” (Jerry Aaker, dkk., 1993)

Perencanaan harus mengikuti disiplin dan landasan pikir yang jelas dengan asas-asas sebagai berikut :

1. Asas hubungan yang jelas. Perencanaan harus mampu menghubungkan dengan jelas antara cara dan langkah-langkah kepada tujuan yang juga dirumuskan secara jelas. Misalnya tujuan meningkatkan pendapatan petani. Langkah pertama memberikan bimbingan teknis,

dengan bimbingan teknis produksi meningkat, peningkatan produksi meningkatkan pendapatan.

2. Asas sederhana. Perencanaan mesti sederhana, dalam arti disesuaikan dengan kemungkinan atas realitas dalam hal misalnya teknologi, sumberdaya, sumber dana, dan lain-lain.

3. Asas analisis dan klasifikasi. Perencanaan harus melakukan analisis dan klasifikasi tentang cara dan alat-alat serta target yang paling tepat untuk mencapai tujuan. Analisis dan klasifikasi ini akan menjadi informasi utama dan menjadi pedoman didalam pelaksanaan.

4. Asas fleksibel. Perencanaan yang disusun dengan analisis dan klasifikasi juga mempersiapkan pilihan-pilihan alternatif yang disusun dalam urutan klasifikasi prioritas. Setiap ada kelainan di lapangan maka perencanaan harus dapat disesuaikan dengan memilih alternatif yang sudah diperhitungkan. Oleh sebab itu merevisi, merubah atau melakukan peninjauan kembali adalah suatu keniscayaan.

5. Asas keseimbangan. Dalam perencanaan harus terdapat keseimbangan antara bagian-bagian pokok dari tujuan dan kemampuan. Misalnya perencanaan peningkatan produksi seimbang dengan kemampuan transportasi agar produksi dapat dipasarkan.

6. Asas pemanfaatan sumberdaya yang sudah ada.

METODE PELAKSANAAN

Pengabdian kepada masyarakat ini dilakukan melalui dua bentuk kegiatan yaitu pelatihan dan *workshop*. Penyuluhan diisi dengan memberikan penjelasan yang mengandung pengetahuan tentang rencana pembangunan nagari, teknik penggalian potensi nagari untuk mengidentifikasi rencana pembangunan nagari berikut menganalisis bagaimana perencanaan pembangunan yang partisipatif.

Metode yang digunakan dalam kegiatan ini adalah metode penyuluhan dan pelatihan partisipatif yang menitikberatkan peranserta seluruh peserta pelatihan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Dimulai dengan penetapan pelatihan kemudian diikuti dengan penetapan pelatihan, dan selanjutnya diikuti dengan penyuluhan dengan menggunakan beberapa metode sebagai berikut :

1. *Ice breaking*, dilaksanakan dengan pertanyaan awal yang berfungsi untuk pencairan suasana sekaligus menghidupkan suasana agar peserta siap menerima pelatihan dan terhindar dari kejenuhan.

2. Ceramah/pemberian materi. Pemberian materi dilakukan agar peserta pelatihan dapat meningkatkan pemahamannya tentang perencanaan pembangunan nagari, penyusunan program pembangunan nagari sampai kepada memanfaatkan sumberdaya nagari untuk menyusun perencanaan nagari kedepannya.

3. Lokakarya. Dilakukan untuk melatih keterampilan peserta dalam menyusun rencana program

pembangunan nagari berdasarkan teknik penggalian potensi nagari dengan menggunakan sketsa nagari, kalender musim dan diagram kelembagaan termasuk mengkaji sumberdaya nagari.

4. *Brainstorming*, merupakan proses pengumpulan gagasan bersama dan menjadikan suatu inventarisasi perencanaan program pembangunan nagari.

5. Diskusi, merupakan proses yang dilakukan untuk membahas masalah yang ditemui di lapangan. Diskusi dilakukan pada setiap bagian materi yang dianggap sulit.

6. Praktek. Praktek penyusunan panduan perencanaan pembangunan nagari yang efektif dan efisien bagi nagari persiapan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil dari kegiatan pengabdian masyarakat ini dapat disikapi melalui perubahan pengetahuan dan perubahan keterampilan khalayak sasaran dalam merencanakan pembangunan nagari melalui tiga teknik yang telah ditetapkan sebelumnya. Hal ini juga diungkapkan melalui respon khalayak sasaran dalam mengisi angket dari instrumen evaluasi. Dari analisis evaluasi tergambar 85% dari khalayak sasaran merasakan peningkatan pengetahuan dan keterampilan dalam menyusun perencanaan pembangunan nagari.

Untuk merencanakan pembangunan nagari diperlukan musyawarah nagari di tingkat jorong dan musyawarah

pembangunan (musbang) nagari. Musbang nagari yang pada akhirnya dikenal dengan musyawarah rencana pembangunan (musrenbang) nagari adalah salah satu implikasi dari pendekatan pembangunan partisipatif. Pendekatan pembangunan partisipatif memberikan kesempatan untuk menyatakan masalah yang dihadapi dan gagasan-gagasan sebagai masukan untuk berlangsungnya proses perencanaan berdasarkan kemampuan masyarakat itu sendiri. Masyarakat diberi hak untuk terlibat secara demokratis dalam ikut menentukan berbagai hal yang menyangkut kehidupannya.

Munculnya pendekatan partisipatif dalam UU No.25 tahun 2005 merupakan suatu proses demokratik dalam sistem perencanaan ke depan. Hal ini ditandai dengan semakin besarnya peran masyarakat untuk ikut menentukan kebijakan dan strategi pembangunan daerah. Dengan demikian akan lebih menguatkan legitimasi dari perencanaan itu sendiri.

Usulan program-program pembangunan dihasilkan setidaknya melalui empat langkah perencanaan pembangunan yang meliputi hal berikut :

1. Analisa keadaan saat ini.
2. Penentuan proyeksi, tujuan, strategi dan sasaran.
3. Perumusan rencana tindakan dalam bentuk program dan proyek.
4. Penjadwalan dan analisis jaringan kerja.

Mengacu kepada langkah-langkah (tahapan) perencanaan pembangunan di atas, maka proses perencanaan pembangunan nagari meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut : *Pertama*, pengkajian keadaan nagari yaitu menghimpun masalah dan potensi nagari yang bersumber dari sketsa nagari, kalender musim dan bagan kelembagaan. *Kedua*, pemilihan tindakan (berdasarkan proyeksi, tujuan, strategi dan sasaran), yaitu pengelompokkan dan penentuan peringkat masalah, serta pengkajian dan penentuan peringkat tindakan. *Ketiga*, perumusan dan penentuan rencana berdasarkan kurun waktu tertentu. Tahapan ini meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

1. Perumusan rencana program swadaya kelompok dan lingkungan masyarakat nagari.
2. Perumusan rencana program yang tersedia sumber dananya (dari pemerintah atau pihak lain).
3. Memadukan program swadaya dan program yang tersedia sumber dananya.
4. Merumuskan Daftar Usulan Rencana Pembangunan (DURP) nagari.
5. Merumuskan Rencana Pembangunan Tahunan (RPTN).
6. Merumuskan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari (RPJMN) yang berdurasi 3 sampai 5 tahun.

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No.114 tahun 2014 pasal 7 ayat 3 mengatur tahapan penyusunan RPJM Desa/Nagari yaitu:

1. Pembentukan Tim Penyusun RPJM Desa.



2. Penyeragaman arah kebijakan perencanaan pembangunan kabupaten/kota.
 3. Pengkajian keadaan desa.
 4. Penyusunan rencana pembangunan desa melalui musyawarah desa.
 5. Penyusunan rancangan RPJM Desa.
 6. Penyusunan rencana pembangunan desa melalui musrenbang desa).
 7. Penetapan RPJM Desa.
- Secara rinci tahapan dan keluaran serta pelaku dalam penyusunan RPJM Desa ini dapat dilihat pada tabel berikut :

No	Tahapan/Kegiatan	Hasil/Keluaran	Keterangan
	Pembentukan Tim Penyusun RPJM Desa	Terbentuknya Tim Penyusun RPJM Desa yang beranggota 7-11 orang	Dibentuk oleh Kepala Desa dengan SK Kepala Desa
	Penyeragaman arah kebijakan pembangunan kabupaten/kota	<ul style="list-style-type: none">• Data dan analisis :• RPJMD kabupaten/kota;• Rencana strategis satuan kerja perangkat daerah;• Rencana umum tata ruang wilayah kabupaten/kota;• Rencana rinci tata ruang wilayah kabupaten/kota; dan• Rencana pembangunan kawasan perdesaan	Dilakukan oleh Tim Penyusun RPJM Desa
	Pengkajian keadaan desa	<ul style="list-style-type: none">• Penyeragaman data desa (data sekunder).• Penggalan gagasan masyarakat, untuk melihat potensi dan masalah.• Penyusunan laporan hasil pengkajian keadaan desa	Tim Penyusun RPJM Desa



	Penyusunan rencana pembangunan desa melalui musyawarah desa (analisa data dan pelaporan data desa yang sudah diselenggarakan)	<ul style="list-style-type: none"> • Data rencana program pembangunan kabupaten/kota yang akan masuk ke desa. • Data rencana program pembangunan kawasan perdesaan. • <input type="checkbox"/> Rekapitulasi usulan rencana kegiatan pembangunan desa dari dusun dan/atau kelompok masyarakat. 	Tim Penyusun RPJM Desa
No	Tahapan/Kegiatan	Hasil/Keluaran	Keterangan
	Penyusunan rencana pembangunan desa melalui musyawarah desa	<ul style="list-style-type: none"> • Berita acara penyusunan Rancangan RPJM desa, yang dilampiri: • Laporan hasil pengkajian keadaan desa. • Rumusan arah kebijakan pembangunan desa yang dijabarkan dari visi dan misi Kepala Desa. • Rencana prioritas kegiatan penyelenggaraan pemerintahadesa, pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa 	<input type="checkbox"/> BPD <input type="checkbox"/> Tim Penyusun RPJM Desa <input type="checkbox"/> Masyarakat desa
	Penyusunan Rancangan RPJM Desa	<ul style="list-style-type: none"> • Rancangan RPJM Desa yang mendapatkan persetujuan Kepala Desa. 	Tim Penyusun RPJM Desa
	Penyusunan rencana pembangunan desa melalui musyawarah perencanaan	<ul style="list-style-type: none"> • Rancangan RPJM Desa dibahas melalui musyawarah desa dan disepakati olehpeserta 	<input type="checkbox"/> BPD <input type="checkbox"/> TimPenyusunRPJM Desa

	pembangunan desa	Musyawarah Desa untuk ditetapkan sebagai RPJM Desa	<input type="checkbox"/> Masyarakat desa
	Penetapan dan perubahan RPJM Desa	<ul style="list-style-type: none"> Rancangan peraturan desa tentang RPJM Desa dibahas dan disepakati bersama oleh Kepala Desa dan BPD untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa tentang RPJM Desa 	<input type="checkbox"/> Kades <input type="checkbox"/> BPD

Sumber: Wahyudin Kessa (2015).

Hal penting sebagai langkah awal untuk menyusun RPJM Nagari adalah melakukan penggalian gagasan. Penggalian gagasan dimulai di tingkat jorong untuk selanjutnya diproses di tingkat nagari. Dalam penggalian gagasan, menggunakan beberapa teknik, yaitu potret sketsa nagari, kalender musim, bagan kelembagaan. Potret sketsa nagari merupakan perencanaan pembangunan nagari berdasarkan wilayah nagari. Oleh sebab itu aparat pemerintahan nagari dan tokoh masyarakat harus mengenali potret sketsa nagarinya tersebut.

Berdasarkan potret sketsa nagari, selanjutnya dapat diidentifikasi daftar masalah dan potensi nagari sebagaimana contoh berikut :

No.	Masalah	Potensi
1	Jalan di wilayah RW 02 sepanjang 1.200 meter	Batu ; pasir ; tenaga gotong royong

	rusak berat	
2	Lingkungan penduduk RW 07 tidak sehat	LK Nagari dan PKK ; kader-kader di desa ; puskesmas pembantu
3	Banyak anak balita di RW 13 menderita penyakit campak	Puskesmas pembantu ; posyandu ; kader posyandu

Selanjutnya perencanaan pembangunan nagari dapat juga dilakukan melalui teknik kalender musim.

Maksudnya mengidentifikasi potensi nagari berdasarkan masalah musim yang dihadapi, seperti musim hujan, kemarau, dan musim pancaroba.

Contoh :

o.	Masalah	Potensi
	Di musim kemarau, beberapa jorong mengalami kekeringan	Sungai ; mata air ; swadaya masyarakat ; batu pasir
	Di musim hujan, masyarakat pada beberapa jorong menderita diare	Puskesmas pembantu ; posyandu ; kebun obat keluarga ; bidan
	Di musim pancaroba, banyak masyarakat terserang infeksi saluran pernafasan akut (ISPA)	Puskesmas pembantu ; kebun obat keluarga ; posyandu ; kader posyandu

Sementara itu berdasarkan teknik bagan kelembagaan nagari, maka perencanaan pembangunan nagari dilakukan melalui pengidentifikasi permasalahan yang dihadapi oleh masing-masing lembaga sebagaimana contoh berikut :

no	Lembaga	Masalah	Potensi

Pemerintah nagari dan BAMUS	Pemerintah nagari kurang dalam memberikan pelayanan pada masyarakat	Perangkat lengkap ; sarana tersedia
LK Nagari	Pengurus LK Nagari sebagian besar tidak tampak kegiatannya	Pengurus lengkap ; tenaga pengurus potensial
Koperasi	Kurang bermanfaat dalam memasarkan hasil pertanian	Ada program pelatihan ; ada kredit bunga rendah

Perencanaan pembangunan nagari yang telah disusun sedemikian rupa tidak akan optimal dan mencapai tujuan apabila tidak segera diantisipasi hal-hal yang berpengaruh bagi keberlanjutan pembangunan nagari pada umumnya dan perencanaan pembangunan nagari pada khususnya. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi

perencanaan pembangunan nagari, yaitu :

1. Konsep kewilayahan.

Dalam melakukan perencanaan pembangunan nagari langkah pertama yang dilakukan adalah kajian terhadap profil dari wilayah. Untuk mendapatkan gambaran suatu wilayah dengan cepat biasanya digunakan metode *Rural Rapid Appraisal (RRA)*. Pemahaman terhadap konsep wilayah akan berpengaruh terhadap perencanaan pembangunan itu sendiri. Dalam memahami konsep kewilayahan minimal ada dua prinsip yang harus dipahami yaitu prinsip homogenitas dan prinsip nodalitas.

Prinsip homogenitas melihat wilayah nagari sebagai kesatuan karakteristik ekonomi, geografis ataupun demografis. Jika kriteria ekonomi dipakai, maka nagari homogenitas dalam sistem produksi seperti pertanian berskala rendah, perkebunan dan sebagainya. Sedangkan prinsip nodalitas melihat wilayah nagari sebagai suatu jaringan antar saluran fungsi yang memberikan kesatuan wilayah. Menurut prinsip ini sejumlah kriteria dapat dipakai pada sub divisi, misalnya fungsi pemerintahan menggambarkan jaringan antar kelembagaan, antar fungsi unit-unit administratif dan sebagainya.

2. Faktor Administratif.

Faktor administratif sangat berpengaruh terhadap optimalisasi penyusunan perencanaan pembangunan nagari.

Kemampuan manajerial administratif dan kepribadian pemimpin program sangat mendukung kelancaran pembangunan nagari. Kemampuan ini difokuskan kepada pemanfaatan dan pengembangan kemampuan manajerial masyarakat. Untuk itu birokrasi yang berbelit-belit harus dihindari.

3. Faktor sumberdaya manusia.

Sumberdaya manusia yang berkualitas merupakan faktor penentu keberhasilan suatu perencanaan pembangunan nagari. Sumberdaya manusia penyelenggara/ aparatur nagari yang mumpuni dan sumberdaya manusia masyarakat yang memahami seluk beluk program untuk pembangunan nagari akan sangat membantu pencapaian program. Oleh sebab itu perlu kegiatan *empowering* yang terus menerus agar sumberdaya manusia mumpuni, baik dari kalangan pemerintah maupun dalam kalangan masyarakat nagari semakin terus bertambah.

4. Faktor kultural.

Perencanaan pembangunan nagari harus mengacu kepada budaya, adat istiadat dan kepercayaan masyarakat setempat. Oleh sebab itu sistem perencanaan yang sesuai adalah sistem perencanaan melalui informasi komunitas yang mampu memobilisasi sumber-sumber sosio kultural masyarakat.

5. Faktor Ekonomi.

Faktor ekonomi termasuk faktor penting yang juga mempengaruhi perencanaan pembangunan nagari. Stabilitas dan pertumbuhan ekonomi yang baik berimplikasi terhadap penyusunan skala prioritas dari pembangunan yang akan dilaksanakan, jumlah program serta alokasi penganggaran yang disediakan untuk keperluan tersebut. Oleh karena itu perencanaan program pembangunan nagari harus mencermati kondisi perekonomian yang dimiliki sehingga program yang direncanakan *feasible* atau realistis untuk direalisasikan.

Menurut Binsar (2010) kegagalan proses penyusunan perencanaan dapat terjadi karena aparat pelaksana tak siap atau tidak kompeten, sehingga perencanaan mungkin baik tetapi pelaksanaannya tidak seperti seharusnya. Oleh sebab itu perlu ditingkatkan kapasitas sumberdaya manusia perencana menyangkut prosedur, tahap-tahap perencanaan, cara berkomunikasi, dan paham isu-isu yang bersifat substantif.

KESIMPULAN DAN SARAN

Dari pelaksanaan kegiatan pengabdian pada masyarakat ini dapat disimpulkan bahwa khalayak sasaran dapat meningkatkan pengetahuannya tentang proses penyusunan rencana program pembangunan nagari dan terampil menggunakan tiga teknik penggalian permasalahan dan potensi nagari yang menjadi sarana untuk memetakan kebutuhan perencanaan di tingkat nagari.

SARAN

Kegiatan ini hendaknya dilaksanakan dengan perluasan khalayak sasaran agar peran serta masyarakat menjadi suatu keharusan dalam perencanaan pembangunan nagari terlebih pada suatu nagari persiapan yang akan menuju nagari definitif.

UCAPAN TERIMAKASIH

Terimakasih kepada Rektor Universitas Negeri Padang yang telah mengalokasikan dana bagi terselenggaranya pengabdian kepada masyarakat ini. Selanjutnya juga terimakasih kepada Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, dan Camat Kamang Magek serta Aparat dan tokoh masyarakat Nagari Persiapan Kamang Tengah Anam Suku yang telah memberikan dukungan moril dan materil bagi berjalan lancarnya proses pelaksanaan pengabdian ini.

DAFTAR PUSTAKA

Adnan, M.Fachri & Al Rafni (2015), *Konseptualisasi Model Tata Kelola Pemerintahan Nagari sesuai Prinsip Good Governance*, Laporan penelitian, Universitas Negeri Padang.

_____ (2014), *Konseptualisasi Model Tata Kelola Pemerintahan Nagari sesuai Prinsip Good Governance*, Laporan penelitian, Universitas Negeri Padang.

Diana Conyers. (1994). *Perencanaan Sosial di Dunia Ketiga : Suatu*



Pengantar. Diterjemahkan oleh
Susetiawan. Yogyakarta :
Gadjahmada University Press.

Jerry Aaleer, dkk. (1993).
*Perencanaan dan Pengelolaan
Berbasis Nilai*. Arkansas : Heifer
Project.

Jhingan, ML. (2003). *Ekonomi
Pembangunan dan Perencanaan
(Edisi Indonesia)*. Jakarta : PT.
Rajagrafindo Persada.

Michael P. Todaro. (2004).
*Pembangunan Ekonomi Dunia Ketiga
(Edisi Indonesia)*. Jakarta :
Erlangga.

Moeljarto Tjokrowinoto. (1996).
*Pembangunan : Dilema dan
Tantangan*. Yogyakarta : Pustaka
Pelajar.

PPS-Unand. (2004). *Rancangan
Modul Pelatihan Pengelolaan*

*Pembangunan Tingkat Lokal,
Nagari, Desa dan Kelurahan*.

Rafni, Al, dkk (2005), *Pembinaan
dan Penataan Penyelenggaraan
Nagari di Sumatera Barat*, Laporan
Penelitian, Badan Penelitian dan
Pengembangan Provinsi Sumatera
Barat, Padang.

Suryanef dan Al Rafni. (2009),
*Evaluasi Nagari Bantuan Pilot
Proyek dalam rangka Meningkatkan
Pelaksanaan Pemerintahan Nagari di
Sumatera Barat*, Laporan Penelitian,
BAPPEDA, Provinsi Sumatera Barat.

Suryanef, dkk. (2009 - 2011),
*Pemberdayaan Masyarakat Adat
sebagai Basis Penataan
Pemerintahan Nagari di Sumatera
Barat*, Laporan Penelitian Hibah
Bersaing, Lembaga Penelitian
Universitas Negeri Padang.